

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis akan memaparkan terkait literatur-literatur yang berkaitan dengan bagaimana peran Polandia dalam menangani krisis pengungsi Ukraina pasca-invasi Rusia, di kawasan Uni Eropa. Literatur pertama yang penulis gunakan yaitu penelitian yang berjudul, **Penerimaan dan Integrasi Pengungsi dari Ukraina di Polandia, Republik Ceko, Slovakia, dan Hongaria-Tujuan Imigrasi Baru di Eropa Tengah**” Pedziwiatr & Magdziarz, 2022. Meneliti bagaimana negara-negara Visegrad merespons krisis pengungsi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Perubahan signifikan terjadi sejak akhir Februari 2022, ketika sekitar satu dari tiga warga Ukraina terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat serangan militer Rusia. Peristiwa ini menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern di perbatasan Timur Uni Eropa. Data UNHCR, hingga bulan Agustus 2022 lebih dari 6,6 juta warga Ukraina mencari perlindungan di berbagai negara di Eropa, dengan jumlah besar menetap sementara di Eropa Tengah, khususnya Polandia dan Republik Ceko (Pedziwiatr & Magdziarz, 2022).

Dalam hasil penelitian, negara-negara Visegrad (Polandia, Republik Ceko, Hongaria, dan Slovakia) menghadapi tantangan besar dalam menerima dan mengintegrasikan pengungsi. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pengalaman dalam menangani migran paksa, keterbatasan infrastruktur, serta koordinasi kebijakan yang belum optimal. Sebelumnya wilayah ini lebih dikenal sebagai kawasan emigrasi dibandingkan destinasi imigrasi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan dalam waktu yang singkat guna mengakomodasi pengungsi Ukraina (Pedziwiatr & Magdziarz, 2022).

Penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif dan bertujuan memberikan dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai kebijakan penerimaan dan integrasi pengungsi di Eropa Tengah. Fokus utama dalam menangani arus pengungsi dalam penelitian ini adalah keterbatasan pengalaman institusi dalam menangani arus pengungsi dalam jumlah besar. Infrastruktur yang tidak memadai, regulasi hukum

yang belum tersusun dengan baik, serta koordinasi kebijakan yang lemah menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi yang telah dirancang (Pedziwiatr & Magdziarz, 2022). Sementara itu, penelitian ini secara spesifik berfokus pada peran Polandia dalam menangani krisis pengungsi Ukraina pasca-invasi Rusia, dengan melihat dampak kebijakan perlindungan yang diterapkan serta proses integrasi pengungsi di kawasan Polandia. Selain itu penelitian ini menyoroti implementasi kebijakan pemerintah Polandia dalam menangani pengungsi Ukraina yang menjadi fokus utama dalam jurnal yang dianalisis.

Literatur kedua yang penulis gunakan yaitu **Brian Rizky Bimantara (2018) dalam penelitian yang berjudul "Inkonsistensi Polandia dalam Merespons Krisis Pengungsi di Eropa"** yang menjelaskan bahwa Polandia menunjukkan ketidakkonsistenan dalam mengimplementasikan European Refugee Relocation Plan sebagai respons terhadap krisis pengungsi di Eropa (Bimantara, 2018). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sebagai anggota Uni Eropa, Polandia memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam skema relokasi pengungsi. Namun, faktor identitas nasional dan perbedaan nilai dengan Uni Eropa menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengungsi (Bimantara, 2018).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Polandia dalam menangani pengungsi dipengaruhi oleh kontradiksi antara nilai nasional dan tuntutan kebijakan Uni Eropa. Sejarah panjang sebagai negara dengan populasi yang homogen dari segi etnis dan agama menciptakan hambatan dalam penerapan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, sekuritisasi isu pengungsi oleh elit politik semakin memperkuat persepsi ancaman terhadap stabilitas domestik dan identitas. Kesimpulan pada penelitian ini menegaskan bahwa inkonsistensi dalam kebijakan pengungsi terjadi akibat tidak adanya facilitating faktor yang mendukung implementasi kebijakan relokasi. Selain itu, perbedaan norma dan nilai antara Polandia dan Uni Eropa menjadi faktor utama yang mempengaruhi sikap Polandia dalam menangani krisis pengungsi (Bimantara, 2018).

Pada literatur ketiga, yaitu pada penelitian **Krzysztof Goniewicz (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Pengungsi Perang Ukraina di Polandia:**

**Penilaian dan Rekomendasi untuk Pendidikan dan Implementasi Kesiapsiagaan Krisis".** Mengkaji bagaimana krisis pengungsi yang di sebabkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina berdampak pada kesiapan sistem Polandia dalam menampung dan mengintegrasikan pengungsi.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa serangan bersenjata Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak perang dunia II. Data dari UNHCR menunjukkan bahwa lebih dari 11 juta orang telah meninggalkan Ukraina akibat konflik tersebut (Goniewicz, 2022). Dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesiapan otoritas Polandia dalam menghadapi gelombang pengungsi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek koordinasi antara pemerintah, organisasi nonpemerintah, serta komunitas lokal. Kurangnya infrastruktur yang memadai, hambatan bahasa, dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama proses integrasi pengungsi di Polandia. Selain itu juga sistem perlindungan sosial dan layanan publik menghasapi tekanan besar akibat jumlah pengungsi yang terus menerus meningkat dalam waktu yang singkat (Goniewicz, 2022).

Pembahasan mengenai peran Polandia dalam menangani pengungsi Ukraina menjadi aspek utama dalam kajian ini sebagaimana juga menjadi perhatian dalam penelitian yang sedang dilakukan. Tantangan dalam integrasi serta upaya kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut menjadi isu yang terus berkembang. Namun, jurnal ini lebih menyoroti kesiapsiagaan krisis dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh otoritas Polandia dalam menghadapi gelombang pengungsi, sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih menekankan pada analisis kebijakan perlindungan serta dampaknya terhadap pengungsi Ukraina dalam jangka panjang.

Literatur keempat, dalam jurnalnya yang berjudul **"Bentuk Bantuan yang Diberikan kepada Pengungsi Rusia–Ukraina 2022: Kasus Polandia"** Elzbieta Ociepa-Kicińska and Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (2022). Mengkaji berbagai bentuk intervensi kebijakan yang diterapkan pemerintah Polandia dalam menghadapi arus pengungsi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Studi ini menyoroti

bagaimana upaya penyesuaian sistem hukum dan kesejahteraan sosial yang dilakukan guna memberikan perlindungan serta dukungan yang lebih komprehensif bagi pengungsi. Dalam kajiannya disampaikan bahwa invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menciptakan salah satu gelombang pengungsian terbesar dan tercepat di Eropa. Dalam kurun waktu enam hari pertama, jumlah pengungsi yang meninggalkan Ukraina telah melampaui 4 juta jiwa, dengan Polandia menjadi negara tujuan utama bagi sebagian besar pengungsi warga Ukraina (Kincinska & Koczkodaj, 2022).

Pada penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa respon awal terhadap krisis ini di dominasi oleh inisiatif masyarakat sipil Polandia, yang secara spontan menyediakan bantuan kemanusiaan berupa makanan, tempat tinggal, serta dukungan logistik lainnya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Polandia mulai menerapkan berbagai kebijakan berbasis sistem, termasuk kebijakan hukum guna memastikan akses pengungsi terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek administratif, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan infrastruktur dalam menampung jumlah pengungsi yang terus meningkat (Kincinska & Koczkodaj, 2022).

Jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam hal analisis kebijakan pemerintah Polandia dalam menangani pengungsi Ukraina serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Namun jurnal ini lebih menitikberatkan pada bentuk konkret bantuan yang diberikan serta perubahan kebijakan hukum yang diterapkan untuk merespons situasi darurat tersebut. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan lebih berfokus pada evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan dan integrasi pengungsi dalam jangka panjang, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Polandia.

Literatur kelima, dalam jurnal yang berjudul **"Disinformasi dan Integrasi Migran: Kasus Polandia"** oleh Olena Shelest-Szumilas (2022). Menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari konflik bersenjata menjadikan integrasi migran sebagai suatu isu yang semakin mendapat perhatian

publik. Pengungsi sangat bergantung pada informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti media tradisional, media sosial, serta lembaga pemerintah dalam membangun pemahaman mengenai situasi yang dihadapi dan dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Szumilas, 2022).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam integrasi pengungsi di Polandia adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan informasi dengan sistem dukungan yang tersedia. Pengungsi mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait hak-hak mereka, layanan sosial, serta prosedur administratif yang berlaku. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan organisasi nonpemerintah menyebabkan informasi yang disediakan tidak terstruktur dengan baik, tersebar dalam berbagai sumber, serta sulit diakses oleh pengungsi yang tidak memiliki pemahaman bahasa Polandia (Szumilas, 2022). Selain itu, penyebaran disinformasi di masyarakat memperburuk kondisi pengungsi dengan meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi serta memicu sentimen negatif dari masyarakat setempat (Szumilas, 2022). Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem informasi bagi pengungsi, masih terdapat kekurangan dalam efektivitas komunikasi antara lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan komunitas pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengungsi guna mendukung kelancaran proses integrasi (Szumilas, 2022).

Pada kelima literatur empiris diatas, menyoroti bagaimana Polandia memainkan peran penting sebagai negara tujuan utama pengungsi Ukraina pasca-invasi Rusia tahun 2022. Seluruh studi mengakui bahwa skala krisis ini merupakan salah satu yang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, dan secara langsung menempatkan Polandia pada posisi strategis dalam arus migrasi massal di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Kesamaan lain terletak pada fokus terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Polandia dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan integrasi pengungsi, seperti

keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta beban berat terhadap sistem pelayanan publik. Selain itu, terdapat pula penekanan terhadap pentingnya dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah dalam menutupi kekosongan kebijakan pada tahap-tahap awal krisis, serta perlunya kerangka hukum yang adaptif dalam merespons situasi darurat.

Meskipun memiliki titik temu dalam menggambarkan konteks kebijakan dan tantangan struktural, masing-masing kajian menampilkan perbedaan dari segi sudut pandang, pendekatan analitis, dan fokus isu yang diangkat. Beberapa kajian lebih menyoroti aspek kebijakan regional serta transformasi peran negara-negara Eropa Tengah dari wilayah emigrasi menjadi destinasi utama migrasi paksa, sedangkan yang lain menitikberatkan pada dinamika politik identitas dan ketegangan normatif antara nilai nasional Polandia dan nilai-nilai yang dijunjung oleh Uni Eropa. Pendekatan berbasis kesiapsiagaan krisis juga diangkat secara mendalam dalam salah satu kajian, yang menyoroti lemahnya sistem koordinasi dan keterbatasan kapasitas institusi dalam menangani lonjakan pengungsi dalam waktu yang sangat singkat.

Selain itu, terdapat pula analisis mengenai implementasi kebijakan hukum dan bentuk konkret bantuan yang diberikan kepada pengungsi, yang menunjukkan adanya pergeseran dari respons spontan masyarakat sipil menuju kebijakan yang lebih sistematis. Di sisi lain, terdapat juga pendekatan yang memfokuskan pada dimensi komunikasi dan informasi, khususnya bagaimana kesenjangan informasi dan disinformasi menjadi faktor penghambat integrasi pengungsi serta memperburuk kerentanan sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan pengungsi tidak hanya dapat dipahami dari aspek kebijakan formal semata, melainkan juga harus dikaji dari sudut sosial, politik, dan institusional secara menyeluruh.

Dengan demikian, berbagai perspektif dalam literatur yang dianalisis saling melengkapi satu sama lain dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas peran Polandia dalam menangani krisis pengungsi Ukraina. Penelitian ini mengambil manfaat dari pendekatan-pendekatan tersebut dalam menyusun analisis mendalam terkait bagaimana peran negara dibentuk oleh interaksi antara identitas nasional, tekanan geopolitik, tuntutan normatif dari aktor internasional, serta

kapasitas domestik dalam menghadapi tekanan kemanusiaan yang bersifat mendesak.

Literatur keenam dalam penelitian ini adalah jurnal berjudul "**National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy**" yang ditulis oleh K.J Holsti, memperkenalkan konsep national role conceptions sebagai kerangka untuk memahami bagaimana para pengambil kebijakan memaknai peran negara mereka dalam sistem internasional. Holsti menyatakan bahwa negara, seperti halnya individu dalam masyarakat, memiliki peran-peran tertentu yang dikonstruksikan melalui interaksi sosial dan dipengaruhi oleh persepsi internal maupun ekspektasi eksternal. Konsep ini menjadi terobosan dalam studi kebijakan luar negeri karena menggeser fokus analisis dari kepentingan objektif dan kekuatan material ke arah identitas, persepsi, dan pola interaksi diplomatik yang berulang (Holsti, 1970). Holsti menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dapat dianalisis dengan memahami role performance (tindakan nyata negara) dan role conception (gambaran atau pemahaman aktor kebijakan tentang peran negaranya). Ia menyusun tipologi peran negara berdasarkan studi terhadap 71 pemerintahan, dan mengidentifikasi bahwa negara tidak hanya menjalankan satu peran tunggal, tetapi sering kali memiliki dan menjalankan berbagai peran secara simultan, seperti regional protector, mediator, revolutionary leader, hingga non-aligned actor. Holsti juga menekankan bahwa peran ini bisa bertentangan satu sama lain dan dapat berubah tergantung pada dinamika internal dan lingkungan eksternal (Holsti, 1970).

Selain itu, Holsti mengembangkan perdebatan penting mengenai hubungan antara role conceptions dan stabilitas sistem internasional. Ia berpendapat bahwa jika negara-negara gagal memenuhi peran yang diasumsikan atau diharapkan oleh sistem, maka ketidakseimbangan dan konflik dapat muncul. Namun, ia juga mengakui bahwa sistem internasional berbeda dengan sistem sosial yang lebih terintegrasi, karena tidak memiliki institusi penegak norma yang kuat. Oleh karena itu, peran negara dalam politik internasional lebih bersifat intersubjektif dan tergantung pada pengakuan sosial serta persepsi pemimpin negara tersebut. Dengan memperkenalkan peran sebagai unit analisis antara struktur sistem dan agensi negara, Holsti menempatkan teori peran sebagai jembatan metodologis antara teori hubungan internasional makro

dan analisis kebijakan luar negeri mikro (Holsti, 1970). Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi konseptual yang sangat penting bagi penelitian ini. Melalui kerangka *national role conceptions*, penulis dapat menganalisis bagaimana Polandia membentuk persepsi internalnya sebagai negara pelindung kawasan dan bagaimana ekspektasi dari Uni Eropa serta masyarakat internasional membentuk kebijakan luar negerinya terhadap krisis pengungsi Ukraina. Holsti membantu menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman eksternal, tetapi juga merupakan refleksi dari konstruksi identitas nasional dan peran yang ingin dimainkan oleh negara tersebut dalam sistem internasional (Holsti, 1970).

Literatur ketujuh dalam penelitian ini adalah jurnal berjudul **"Integrating Foreign Policy Analysis and International Relations through Role Theory"** yang ditulis oleh Cameron G. Thies dan Marijke Breuning (2012). Membahas bagaimana teori peran (*role theory*) dapat menjadi jembatan antara dua pendekatan besar dalam studi hubungan internasional, yaitu Foreign Policy Analysis (FPA) dan teori hubungan internasional (IR), khususnya pendekatan konstruktivis. Dalam pendahuluannya, penulis menyatakan bahwa meskipun teori peran awalnya lebih dikenal di kalangan FPA, pendekatan ini juga memiliki potensi besar untuk menyatukan berbagai tradisi akademik dalam studi hubungan internasional, baik dari perspektif agen maupun struktur (Thies & Breuning, 2012). Pada bagian awal pembahasan dijelaskan bahwa teori peran menjelaskan interaksi antara aktor dan struktur dalam sistem internasional, serta dapat menjawab pertanyaan seputar kemungkinan agen bertindak secara otonom dalam batasan sistemik. Perdebatan ini sejalan dengan perhatian utama dalam kajian konstruktivis mengenai bagaimana identitas dan norma memengaruhi perilaku negara. Di sisi lain, FPA yang berfokus pada aktor cenderung mengadopsi pendekatan kognitif, sementara IR cenderung menggunakan pendekatan struktural. Teori peran menjadi titik temu yang menjanjikan antara dua arus besar ini. Dalam kesimpulannya, ini menekankan bahwa teori peran memiliki kapasitas konseptual untuk menghasilkan integrasi antara teori-teori dalam Foreign Policy Analysis dan studi hubungan internasional yang lebih luas. Dengan menggabungkan pemahaman kognitif tentang bagaimana negara

memaknai peran mereka dalam sistem internasional serta struktur yang membatasi atau memberi peluang, teori ini mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dinamika hubungan internasional. Jurnal ini tidak hanya mengadopsi teori peran sebagai alat analisis, tetapi juga menjadikannya sebagai dasar teoritis untuk sintesis antar pendekatan yang selama ini berjalan terpisah (Thies & Breuning, 2012).

Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi teoritis penting bagi penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam memahami bagaimana negara seperti Polandia membentuk dan memainkan perannya dalam konteks krisis pengungsi. Teori peran membantu menjelaskan bagaimana negara merespons ekspektasi domestik dan internasional secara simultan, serta bagaimana identitas peran nasional memengaruhi implementasi kebijakan luar negeri dan pengungsi.

Literatur kedelapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku berjudul **Role Theory and Role Conflict in U.S.-Iran Relations: Enemies of Our Own Making** yang ditulis oleh Akan Malici dan Stephen G. Walker pada tahun 2016. Buku ini menyoroti bagaimana konflik dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sebagian besar disebabkan oleh konflik peran nasional yang saling bertentangan di antara kedua negara (Malici & Walker, 2017). Dalam pendahulunya, penulis mengemukakan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Iran tidak serta-merta bersifat permusuhan, tetapi merupakan hasil dari dinamika interaksi yang dipenuhi dengan konflik peran yang belum terselesaikan Iran, misalnya, berusaha memainkan peran sebagai negara yang independen dan berdaulat secara aktif, sementara negara lain seperti Amerika Serikat terus menempatkannya dalam peran subordinat seperti negara klien atau pemberontak. Pada bagian pembahasan awal, Malici dan Walker menganalisis bagaimana Iran secara historis diposisikan dalam peran-peran inferior oleh kekuatan besar, seperti pada masa intervensi CIA dalam kudeta tahun 1953 atau pada masa krisis sandera tahun 1979. Mereka menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan oleh pihak luar dengan peran yang diinginkan oleh Iran menciptakan konflik identitas nasional yang mendalam. Dalam konteks ini, konflik antara ego (Iran) dan alter (AS) diperparah oleh perbedaan persepsi atas struktur

kekuasaan dan kepentingan nasional yang memengaruhi dinamika hubungan keduanya (Malici & Walker, 2017).

Dalam simpulannya, buku ini menegaskan bahwa teori peran (Role Theory) dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap interaksi antarnegara, khususnya dalam menjelaskan bagaimana perbedaan peran yang dikonstruksikan dapat menimbulkan konflik jangka panjang. Teori ini menekankan bahwa perilaku negara tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan material semata, tetapi juga oleh persepsi dan ekspektasi sosial atas peran yang dimainkan dalam sistem internasional (Malici & Walker, 2017).

Literatur kesembilan dalam penelitian ini adalah jurnal berjudul **“Role Theory, Narratives, and Interpretation: The Domestic Contestation of Roles”** yang ditulis oleh Leslie E. Wehner dan Cameron G. Thies, dan diterbitkan dalam jurnal *International Studies Review* pada tahun 2014. Jurnal ini mengembangkan pendekatan teoritis terhadap teori peran (role theory) dalam studi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, dengan menekankan pentingnya narasi (narratives) serta pendekatan interpretatif untuk memahami bagaimana peran negara terbentuk, diperebutkan, dan dijalankan dalam konteks domestik maupun internasional. Wehner dan Thies menyatakan bahwa meskipun teori peran telah mengalami beberapa gelombang perkembangan sejak diperkenalkan oleh K.J. Holsti (1970), pendekatan ini masih menghadapi keterbatasan metodologis dan sering kali terlalu fokus pada struktur sistem internasional, tanpa cukup memperhatikan proses domestik yang kompleks dalam pembentukan dan perubahan peran nasional (Wehner & Thies, 2014).

Dalam jurnal ini, penulis berargumen bahwa konsep-konsep seperti traditions dan dilemmas dari pendekatan interpretatif dapat memperkaya analisis teori peran dengan menjelaskan bagaimana elite kebijakan luar negeri membentuk dan menyesuaikan peran negara melalui narasi yang berakar pada pengalaman historis dan tantangan kontemporer. Salah satu kontribusi utama artikel ini adalah dengan menunjukkan bahwa peran negara tidak selalu ditentukan secara tunggal oleh konsensus nasional atau ekspektasi eksternal, melainkan merupakan hasil dari

kontestasi domestik antara berbagai kelompok kepentingan dan pemegang kekuasaan dalam sistem politik suatu negara. Dengan demikian, teori peran tidak hanya menjelaskan perilaku negara sebagai respons terhadap struktur internasional, tetapi juga sebagai hasil dari proses naratif yang berlangsung di dalam negeri, di mana berbagai aktor bersaing untuk mendefinisikan identitas dan peran negara (Wehner & Thies, 2014).

Wehner dan Thies juga menekankan pentingnya penggunaan metode naratif dalam studi peran negara, yang memungkinkan peneliti untuk menangkap perubahan makna, konflik peran, dan pergeseran kebijakan melalui analisis terhadap dokumen resmi, pidato politik, wawancara elite, dan sumber-sumber historis lainnya. Peneliti tersebut mengilustrasikan pendekatan ini melalui studi kasus tentang bagaimana Chile dan Meksiko menegosiasikan dan menjalankan perannya dalam kerangka Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Studi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peran negara sangat dipengaruhi oleh dilema kebijakan yang muncul dari perubahan struktur internasional seperti globalisasi ekonomi, serta oleh narasi yang dibangun oleh elite nasional untuk menjustifikasi peran baru atau mempertahankan tradisi kebijakan luar negeri sebelumnya (Wehner & Thies, 2014).

Literatur kesepuluh dalam penelitian ini adalah jurnal berjudul **"Integrating Foreign Policy Analysis and International Relations through Role Theory"** yang ditulis oleh Cameron G. Thies dan Marijke Breuning (2012). Jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana teori peran dapat berfungsi sebagai jembatan konseptual antara dua pendekatan besar dalam studi hubungan internasional, yaitu Foreign Policy Analysis (FPA) dan teori hubungan internasional, khususnya dalam kerangka konstruktivisme. Dalam pengantar jurnal ini, penulis menyoroti bahwa meskipun teori peran awalnya lebih sering digunakan dalam kajian FPA yang berbasis di Amerika Serikat, dalam beberapa dekade terakhir pendekatan ini juga telah diadopsi oleh komunitas akademik di Eropa dan para ilmuwan konstruktivis dalam hubungan internasional (Thies & Breuning, 2012).

Pada bagian awal, Thies dan Breuning menjelaskan bahwa teori peran secara mendasar dibangun untuk menjelaskan interaksi antara agensi dan struktur. Hal ini

menjadikannya sangat relevan dalam menjawab perdebatan klasik dalam hubungan internasional mengenai sejauh mana aktor dapat bertindak secara otonom di bawah kendala sistemik. Jika FPA lebih menekankan pendekatan kognitif terhadap aktor, sementara IR lebih cenderung pada pendekatan struktural, maka teori peran menawarkan titik temu konseptual yang memungkinkan sintesis keduanya. Dengan demikian, teori ini mampu menjelaskan bagaimana identitas dan persepsi peran negara terbentuk melalui proses interaksi sosial, sekaligus memperhitungkan batasan dan peluang yang diberikan oleh struktur internasional. Lebih lanjut, jurnal ini menelusuri perkembangan sejarah teori peran sejak diperkenalkan oleh K.J. Holsti (1970), dan mengulas bagaimana gelombang pertama penggunaan teori ini dalam FPA fokus pada national role conceptions dan implikasinya terhadap perilaku kebijakan luar negeri. Gelombang kedua, sebagaimana ditunjukkan oleh Thies dan Breuning, mulai mengarah pada upaya integrasi antara FPA dan IR, dengan mempertemukan pendekatan agensial dan struktural dalam satu kerangka teoritis (Thies & Breuning, 2012).

Pada kelima literatur teoritis di atas, memiliki kesamaan fundamental dalam menjadikan teori peran (role theory) sebagai pendekatan utama untuk memahami dinamika hubungan internasional dan perilaku kebijakan luar negeri suatu negara. Seluruh karya menekankan bahwa peran negara tidak bersifat statis, melainkan terbentuk dan terus mengalami perubahan melalui interaksi sosial yang melibatkan persepsi internal elite kebijakan serta ekspektasi eksternal dari aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Dengan demikian, keseluruhan literatur tersebut memberikan kontribusi konseptual yang signifikan dalam menjelaskan bagaimana negara-negara membentuk, mempertahankan, serta merumuskan ulang identitas dan peran mereka di tengah dinamika politik global. Perbedaan utama dari kelima literatur tersebut terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan, di mana sebagian menitikberatkan pada konstruksi awal teori peran melalui konsep national role conceptions sebagai alat untuk memahami orientasi kebijakan luar negeri, sementara lainnya melihat teori ini sebagai jembatan konseptual antara Foreign Policy Analysis dan teori hubungan internasional yang struktural. Terdapat juga pendekatan yang menekankan konflik

peran antara peran yang diklaim dan yang dilekatkan oleh aktor lain sebagai sumber ketegangan hubungan internasional, serta pendekatan interpretatif yang menyoroti peran negara sebagai hasil kontestasi domestik antar elite melalui narasi dan dilema kebijakan. Di samping itu, beberapa kajian secara historis menelusuri perkembangan teori peran dari alat klasifikasi deskriptif menjadi kerangka teoritis yang menjelaskan pembentukan identitas negara dan dinamika perubahan peran dalam sistem internasional.

Berdasarkan kesepuluh literatur di atas, maka penelitian ini akan membahas bagaimana Polandia membentuk dan menjalankan perannya dalam menangani krisis pengungsi Ukraina di kawasan Uni Eropa, penelitian ini menggunakan Teori Peran sebagai kerangka teoritis utama, dengan menekankan pada bagaimana persepsi internal elite politik Polandia dan ekspektasi eksternal dari aktor regional seperti Uni Eropa membentuk orientasi kebijakan luar negerinya serta melihat bagaimana interaksi antara negara dan struktur internasional membentuk kebijakan perlindungan, integrasi, dan solidaritas regional terhadap pengungsi Ukraina dalam konteks konflik kontemporer Eropa.